

SUMMARY

ANALISIS TIDAK DIBERIKANNYA KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TERSANGKA YANG MENINGGAL DU

Created by Imam udin

- Subject** : ANALISIS TIDAK DIBERIKANNYA KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TERSANGKA YANG MENINGGAL DU
- Subject Alt** : Skripsi ini membahas tentang mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK pada perkara tindak pidana korupsi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penulisan ini mengambil dua permasalahan yakni apakah yang menjadi la
- Keyword :** : KPK, TIPIKOR
- Contributor** : Mr. (droit) Anatomi Muliawan SH
- Date Create** : 07/09/2014
- Type** : Text
- Format** : pdf
- Language** : Indonesian
- Identifier** : UEU-Undergraduate-UEU-Undergraduate-2009-41-108
- Collection** : UEU-Undergraduate-2009-41-108
- Source** : Undergraduate theses law faculty
- Relation Collection** Universitas Esa Unggul
- COverage** : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul
- Right** : copyright2014@libraryesaunggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor